

**KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM HUKUM NASIONAL**

HANNA NATHASYA RUMIA HUTAPEA

ABSTRACT

A Notary is a public official (openbaar ambtenaar) who has the authority to draw up an authentic deed and other authorities as stipulated in Law No. 2/2014 on Notarial Position. He has to be protected by law, and one of the types of protection is the existence of witnesses who present and directly witness the drawing up of authentic deeds by a Notary; they are called instrumental witnesses. The research used descriptive analytic approach which described in detail and systematically the problems which would be analyzed, based on the description. His responsibility is by witnessing that the person appearing presents before the Notary, the identity of the person appearing has been in line with what has been read by the Notary, the deed is read by the Notary in front of the persons appearing before it is signed, and the deed is signed by the parties concerned and the Notary himself.

Keywords: Instrumental Witness, Notarial Deed

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.¹

¹. Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, diakses dari <http://www.google.com/10E00165-1.pdf> pada tanggal 14 Februari 2015.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.² Dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, perlu adanya profesional hukum yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan bidangnya sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum. Perlu diketahui bahwa profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi menyangkut kepentingan umum (*public trust*).³ Salah satu contoh profesi hukum yang dimaksud adalah Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai salah satu professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum. Dalam rangka menjalankan profesinya, seorang Notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang Notaris dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh Pasal 40 UUJN untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan *Saksi Intrumenter*.

² *Ibid.*

³ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hal 9-10.

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi *instrumenter* (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi *instrumenter* adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.⁴

Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.⁵ Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi *instrumenter* adalah karyawan Notaris sendiri.⁶

Keberadaan *Saksi Instrumenter* selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh *Saksi Instrumenter*. Misalnya pernah terjadi suatu peristiwa hukum tentang pemalsuan keterangan pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula Notaris X telah menerbitkan akta otentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C).

⁴. Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan,2007), hal 35-37.

⁵. *Ibid.*, hal.37.

⁶. Khairulnas, “*Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*”, Majalah Renvoi (Maret 2014), hal 89.

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.⁷

Putusan Mahkamah Agung No. 1847K/PID/2010 menghukum Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, S.H., M.H., terkait pemalsuan salinan akta pendirian yayasan berupa perubahan dan pengurangan isi minuta akta. Kasus ini berawal terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH pada tanggal 26 Desember 1990 bertempat di Kantor Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Jalan Palang Merah No.56 Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Memalsukan surat Akta Authentik yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH pada hari Rabu tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Jalan Palang Merah No. 56 Medan, didatangi Haji Sugeng Imam Soeparno untuk membuat perubahan-perubahan pada Akta Authentik No.132 tanggal 26 Desember 1990, Terdakwa menuliskan perubahan-perubahan dan pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam asli/Minuta Akta Yayasan Trie Argo Mulyo Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 ke dalam selembar kertas kosong, lampiran tersebut kami lampirkan,dalam daftar lampiran.

⁷. Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file%20digital/131194-T), pada tanggal 13 Pebruari 2015.

Isi Akta yang telah dirubah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 08 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Akta Authentik No 132 tanggal 26 Desember 1990 yang seolah-olah sesuai dengan isi Minuta Asli salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH selaku pejabat yang menampung protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. digunakan oleh saksi Haji Sugeng Imam Soeparno sebagai barang bukti dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006. yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. mengakibatkan kerugian kepada saksi Alwi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdata nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006 ; Isi Akta yang telah dirubah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 08 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Akta Authentik No 132 tanggal 26 Desember 1990 yang seolah-olah sesuai dengan isi Minuta Asli salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH selaku pejabat yang menampung protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. digunakan oleh saksi Haji Sugeng Imam Soeparno sebagai barang bukti dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006. yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. mengakibatkan kerugian kepada saksi Alwi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdata nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006.⁹

⁹. Wisni Ariani Batubara, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, diakses dari <http://www.academia.edu/6799783>, pada tanggal 12 Mei 2015.

Merujuk contoh kasus di atas, terlihat sangat nyata bahwa Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta otentik (baik itu pemalsuan keterangan pada akta otentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta), meskipun dalam pembuatan akta otentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter.

Berdasarkan uraian penjelasan dan contoh kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris tersebut di atas, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek notaris khususnya dan lembaga kenotariatan umumnya, serta lembaga yang terkait dalam penegakan hukum di Indonesia.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris?
2. Bagaimanakah ruang lingkup tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan terhadap saksi dalam pembuatan akta Notaris.

- b. Bahan Hukum Sekunder,¹⁰ yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini didukung oleh studi dokumen beserta wawancara dipandu pedoman wawancara, hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).¹² Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³

¹⁰. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.53.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*,

¹². Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal.53.

¹³. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hal.57.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.¹⁴

Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta Notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.¹⁵

Saksi akta atau sering disebut saksi instrumenter, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi.

¹⁴. Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/saksi> tanggal 15 April 2015.

¹⁵. G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.168.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas – formalitas peresmian akta / verlijden seperti yang diperintahkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris.¹⁶

Kedudukan saksi akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya. Selain akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfer antarbank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfer kemudian akta jual belinya dihadapan Notaris.

Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.¹⁷

¹⁶ Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris*, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/T31529](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file%20digital/T31529), pada tanggal 23 Maret 2015.

¹⁷ Sutrisno, *Komentor UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan : tidak ada penerbit, 2007), hal 35-37.

Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi *instrumenter* adalah karyawan Notaris sendiri.¹⁸

Keberadaan *Saksi Instrumenter* selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh *Saksi Instrumenter*.

Pernah terjadi suatu peristiwa hukum tentang pemalsuan keterangan pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula Notaris X telah menerbitkan akta otentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C).

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Selanjutnya Notaris X dan saksi dalam akta (saksi *instrumenter*) dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan. Notaris X dan saksi dalam akta tersebut yang dipanggil ke dalam proses pengadilan berstatus sebagai saksi yang wajib memberikan kesaksian yang benar atas kasus pemalsuan keterangan oleh Tn.A.

¹⁸. Khairulnas, “*Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*”, Majalah Renvoi (Maret 2014), hal 89.

Dalam proses pengadilan, Notaris X menolak untuk memberikan kesaksian karena Notaris X berpedoman dengan adanya Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut seperti yang tersirat dalam ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54.

Dalam penjelasan kasus diatas terlihat jelas bahwa ketika dalam persidangan saksi instrumenter hanya dapat memberikan kesaksian terhadap tanggung jawabnya dalam persemian akta tersebut. Tanggung jawab saksi instrumenter yaitu melihat kehadiran penghadap, kebenaran penghadap membubuhkan tanda tangan serta melihat dan mendengar akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Jika akta tersebut tersandung dalam masalah hukum, maka saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian dalam pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Dalam hal pembacaan akta tersebut, saksi instrumenter dituntut tanggung jawabnya untuk memperhatikan dan mendengarkan pembacaan akta tersebut dengan seksama. Tidak hanya sekedar menjadi saksi, saksi instrumenter juga dapat melihat dan mendengar bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris dengan suara lantang dan memperhatikan bahwa para penghadap mengerti akan klausul-klausul yang dibacakan oleh Notaris.¹⁹

Menurut Notaris Suprayitno saksi instrumenter juga harus benar-benar melihat, bahwa pada akhir bagian penutup akta tersebut telah tertempel sebuah materai yang menjadi bagian penting dalam proses peresmian akta, dan juga melihat bahwa salah satu penghadap atau para pihak membubuhkan tanda tangan mereka dan mengenai bagian dari pada materai tersebut, sehingga proses penandatanganan menjadi sah dan akta tersebut dapat menjadi sebuah akta otentik.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lince Hutahaeen, Notaris Medan tanggal 22 Mei 2015

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno, Notaris Medan tanggal 29 Mei 2015.

Saksi instrumenter dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat-surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam pada itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.²¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kekuatan pembuktian dan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas formalitas-formalitas peresmian akta tersebut. Namun, untuk isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Notarislah yang mengerti isi atau klausul dalam akta tersebut dan telah diketahui oleh para pihak. Sehingga jika terjadi sengketa, saksi hanya menjelaskan apa yang diketahuinya tentang formalitas tersebut. Isi akta tetap menjadi tanggung jawab Notaris.

²¹. G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal.170

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi instrumenter terlihat pada saat saksi dipanggil dalam persidangan. Isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Saksi hanya memberikan kesaksian sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat-surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).
2. Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar penghadap telah hadir di hadapan Notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh Notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

B. Saran

1. Saksi instrumenter dalam peresmian akta merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu kinerja Notaris, oleh sebab itu hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditambahkan pasal mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung jawab saksi instrumenter yang saat ini belum ada dalam Undang-Undang tersebut.
2. Notaris sebagai salah satu profesi hukum lebih selektif dalam memilih saksi yang namanya akan dituangkan dalam akta tersebut, sehingga saksi dalam akta (saksi instrumenter) tersebut dapat mengerti tentang tanggung jawab yang harus

dipenuhi dalam peresmian akta, sehingga dapat membantu kinerja dari profesi Notaris tersebut.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lubis, Suhrawadi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Medan, 2007

B. Website

- Batubara, Wisni Arian, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Tesis, 2015
- Dewi, Rosmala, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris*, Tesis, 2015.
- Kartika, Damara, *Kewajiban Saksi Akta Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris*, Tesis, 2014.
- Putri, Irenrera, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, Tesis, 2015.

C. Tulisan

- Khairulnas, “Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris”, *Majalah Renvoi* (Maret 2014), hal 89.